PENEGAKAN PREVENTIF DAN REPRESIF TIM SATUAN TUGAS DALAM PEMBERANTASAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Paternus Gerald Paleng Suriman
NPP. 33.0693
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: geraldsuriman@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, M.AP.
Email: abdulrahman@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The circulation of illicit cigarettes in West Manggarai Regency is a serious issue because it reduces state excise revenue, disrupts public order, and endangers consumers. The local government has established a Task Force for the Eradication of Illegal Excisable Goods through cross-sector collaboration. However, studies that specifically examine the supporting and inhibiting indicators of preventive and repressive enforcement by this task force remain limited, especially in an archipelagic area with open distribution routes and complex geographical characteristics.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the preventive and repressive enforcement conducted by the Task Force in eradicating illicit cigarettes in West Manggarai Regency.* ***Method:*** *This research employed a descriptive quantitative method. Data were collected through questionnaires, documentation, and literature studies. The respondents consisted of 125 people, including 29 members of the Task Force and 96 community members who participated in socialization activities or experienced enforcement actions. The data were analyzed using the Rasch Model with the assistance of Winsteps software to examine instrument quality, respondents' answer tendencies, and the indicators that were easiest and most difficult to agree with.* ***Result:*** *The findings show that the supporting indicators of preventive enforcement are reflected in personal relevance and community participatory involvement in socialization activities. In repressive enforcement, the supporting indicator is reflected in the consistency of the Task Force in taking action against violations found in the field, indicating that enforcement certainty has been implemented. Meanwhile, the inhibiting indicators include the attractiveness of the source in socialization, the uneven frequency of enforcement operations, and the need to improve the speed of administration and reporting after enforcement actions.* ***Conclusion:*** *Preventive and repressive enforcement by the Task Force has been implemented, but its effectiveness still needs to be improved through better socialization quality, more intensive field operations, and faster administrative follow-up.*

Keywords: *Illegal Cigarettes; Preventive Enforcement; Repressive Enforcement; Task Force*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Manggarai Barat menjadi persoalan yang tidak hanya merugikan penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan membahayakan masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah daerah telah membentuk Tim Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal melalui kerja sama lintas instansi, namun kajian mengenai indikator yang mendukung dan menghambat penegakan preventif dan represif oleh satgas tersebut masih terbatas, terutama pada daerah dengan karakter geografis kepulauan dan jalur distribusi terbuka. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan preventif dan represif Tim Satuan Tugas dalam pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Manggarai Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Responden penelitian berjumlah 125 orang, terdiri atas 29 anggota Tim Satuan Tugas dan 96 masyarakat yang mengikuti sosialisasi atau menerima tindakan penertiban. Data dianalisis menggunakan Model Rasch dengan bantuan aplikasi Winsteps untuk melihat kualitas instrumen, kecenderungan jawaban responden, serta indikator yang paling mudah dan paling sulit disetujui. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pendukung penegakan preventif terlihat pada relevansi pribadi dan keterlibatan partisipatif masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Pada aspek represif, indikator pendukung tampak pada konsistensi satgas dalam menindak pelanggaran yang ditemukan, sehingga unsur kepastian penindakan telah berjalan. Sementara itu, indikator penghambat terletak pada daya tarik sumber dalam sosialisasi, frekuensi penindakan yang belum merata, serta kecepatan administrasi dan pelaporan hasil penindakan yang masih perlu diperkuat. **Kesimpulan:** Penegakan preventif dan represif Tim Satuan Tugas telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kualitas sosialisasi, intensitas operasi lapangan, dan percepatan tindak lanjut administrasi.

Kata kunci: Penegakan hukum; Preventif; Represif; Rokok ilegal; Satuan tugas.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya perlu dikendalikan oleh negara. Dalam konteks ASEAN, merokok masih menjadi persoalan kesehatan publik karena jumlah perokok meningkat secara absolut dan berkontribusi terhadap beban penyakit serta kematian (Dai dkk., 2025). Kebijakan pengendalian tembakau melalui pajak dan cukai juga penting karena ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control dan kenaikan pajak terbukti berhubungan dengan penurunan prevalensi merokok (Paraje dkk., 2024). Oleh karena itu, cukai tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian konsumsi dan pengawasan peredaran hasil tembakau.

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat tanpa memenuhi kewajiban pembayaran cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan (Kemenkeu Learning Center, 2022). Peredaran rokok ilegal menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan hilangnya penerimaan negara, lemahnya kepatuhan hukum, dan munculnya persaingan tidak sehat. Baidhowah (2019) menegaskan bahwa struktur pajak tembakau dan produksi rokok ilegal menjadi persoalan penting dalam tata kelola penerimaan negara, sedangkan Suarda dkk. (2024) menunjukkan bahwa penegakan terhadap perdagangan rokok ilegal di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemanfaatan ketentuan Undang-Undang Cukai dan konsistensi putusan. Ahsan dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa program pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan pendanaan cukai tembakau, peningkatan kesadaran masyarakat, dan koordinasi pemerintah daerah.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki karakteristik geografis yang khas karena wilayahnya meliputi daratan dan kepulauan dengan akses laut yang terbuka. Kondisi ini membuat pengawasan peredaran rokok ilegal tidak cukup dilakukan dengan pendekatan sektoral. Dalam perspektif perlindungan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum memerlukan dukungan kelembagaan, kewaspadaan, serta pelibatan masyarakat (Eviany & Sutiyo, 2023).

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membentuk Tim Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 127/KEP/HK/2025. Satgas ini melibatkan unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sehingga penanganan rokok ilegal dapat dilakukan secara terkoordinasi. Kelembagaan tersebut sejalan dengan praktik penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang menekankan peran perangkat daerah dan koordinasi lintas unsur (Ilham & Rahman, 2023), serta posisi Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah melalui penegakan peraturan daerah (Suhendi, 2021).

Penegakan preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat, pedagang, pelaku usaha, serta aparatur daerah mengenai ciri-ciri rokok ilegal, bahaya rokok ilegal, dan ketentuan cukai. Konsep ini sejalan dengan Friehe dan Tabbach (2013) yang menjelaskan bahwa preventive enforcement diarahkan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Sementara itu, penegakan represif dilakukan melalui pemeriksaan, razia, penyitaan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Pengalaman penegakan aturan rokok oleh Satpol PP menunjukkan bahwa sosialisasi, koordinasi, ketegasan sanksi, dan evaluasi berkala menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan (Supriatna, 2019).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada kesenjangan antara kebutuhan penegakan hukum yang terintegrasi dengan masih adanya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Manggarai Barat. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran cukai, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan masyarakat, ketertiban umum, dan efektivitas koordinasi lintas instansi di daerah.

Penelitian terdahulu tentang rokok ilegal umumnya membahas penegakan hukum oleh instansi tertentu, seperti Bea Cukai, Kepolisian, Satpol PP, atau PPNS. Kajian tersebut telah menunjukkan adanya upaya preventif melalui sosialisasi dan upaya represif melalui penindakan. Akan tetapi,

belum banyak penelitian yang secara khusus mengukur indikator pendukung dan penghambat penegakan preventif dan represif oleh tim satuan tugas lintas instansi yang dibentuk secara resmi melalui keputusan kepala daerah.

Kesenjangan lainnya terletak pada metode. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan proses pengawasan atau penindakan. Penelitian ini berbeda karena menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan Model Rasch untuk mengidentifikasi item yang paling mudah dan paling sulit disetujui oleh responden, sehingga indikator pendukung dan penghambat dapat terlihat lebih terukur.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena peredaran rokok ilegal dapat merugikan negara, melemahkan kepatuhan hukum, mengganggu ketertiban masyarakat, serta merugikan pelaku usaha yang mematuhi ketentuan cukai. Bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas satgas, terutama pada aspek yang sudah kuat dan aspek yang masih perlu diperbaiki.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, pemerintah daerah dan instansi yang terlibat dalam satgas dapat kekurangan dasar empiris dalam menyusun strategi sosialisasi, penjadwalan razia, dan penyampaian hasil penindakan kepada masyarakat. Akibatnya, kegiatan pemberantasan rokok ilegal berisiko hanya dilaksanakan secara administratif tanpa perbaikan berdasarkan persepsi pelaksana dan sasaran kebijakan di lapangan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas penegakan hukum, pengawasan, dan tata kelola rokok ilegal. Baidhowah (2019) meneliti permasalahan produksi rokok ilegal di Indonesia dari perspektif pajak tembakau dan menunjukkan bahwa kompleksitas struktur cukai serta selisih harga dapat menjadi ruang munculnya rokok ilegal. Ahsan dkk. (2024) mengevaluasi pendanaan cukai tembakau untuk pemberantasan rokok ilegal dan menekankan perlunya dukungan pemerintah daerah, sosialisasi, serta penguatan pengawasan.

Suarda dkk. (2024) membahas perdagangan rokok ilegal di Indonesia melalui analisis putusan pengadilan dan menemukan bahwa penerapan ketentuan Undang-Undang Cukai dalam perkara rokok ilegal belum sepenuhnya optimal. Muzammil (2024), Daulay (2025), Budiman (2024), Gani dkk. (2024), serta Sutri dkk. (2022) juga menunjukkan bahwa penegakan rokok ilegal dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif, seperti sosialisasi, penyuluhan, operasi pasar, penyitaan, dan proses hukum.

Dalam konteks ketertiban umum dan peran Satpol PP, Eviany dan Sutiyo (2023) serta Ilham dan Rahman (2023) menegaskan pentingnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari fungsi pemerintahan daerah. Suhendi (2021) menekankan posisi Satpol PP sebagai perangkat daerah penegak peraturan daerah, sedangkan Supriatna (2019) menunjukkan bahwa penegakan aturan terkait rokok oleh Satpol PP memerlukan sosialisasi, koordinasi, ketegasan sanksi, dan evaluasi berkala.

Secara umum, penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam objek dan pendekatan, yaitu penanganan rokok ilegal atau penegakan aturan terkait rokok melalui cara preventif dan represif. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus mengkaji Tim Satuan Tugas lintas instansi di Kabupaten Manggarai Barat serta menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis Model Rasch untuk menemukan indikator pendukung dan penghambat penegakan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dari segi objek kelembagaan karena mengkaji penegakan preventif dan represif yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, bukan hanya oleh satu instansi. Pembentukan satgas melalui SK Bupati memperlihatkan adanya desain kerja lintas sektor yang berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada Bea Cukai, Kepolisian, Satpol PP, atau PPNS secara terpisah.

Kebaruan lain terdapat pada metode analisis. Penelitian ini menggunakan kuesioner skala Likert dan Model Rasch melalui aplikasi Winsteps untuk melihat validitas, reliabilitas, tingkat persetujuan item, person measure, dan Differential Item Functioning. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan penegakan, tetapi juga mengukur indikator pendukung dan penghambat berdasarkan respons anggota satgas dan pedagang.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan preventif dan represif Tim Satuan Tugas dalam pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan dan mengukur indikator penegakan preventif dan represif yang mendukung maupun menghambat kerja Tim Satuan Tugas dalam pemberantasan rokok ilegal. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran empiris berdasarkan data kuesioner yang dianalisis secara sistematis (Sugiyono, 2024).

Populasi penelitian adalah Tim Satuan Tugas dan masyarakat yang diketahui menerima sosialisasi serta tindakan terkait rokok ilegal di Kabupaten Manggarai Barat. Sampel penelitian berjumlah 125 responden, terdiri atas 29 anggota satgas dan 96 pedagang atau masyarakat yang menerima sosialisasi dan/atau penindakan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggabungkan sampling total untuk anggota satgas dan simple random sampling untuk pedagang yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi maupun penindakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner menggunakan skala Likert 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kuesioner digunakan untuk mengukur respons responden terhadap indikator penegakan preventif dan represif, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat data mengenai struktur satgas, tugas pokja, kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan penindakan.

Uji instrumen dilakukan dengan Model Rasch. Validitas item dianalisis melalui Outfit Mean Square (MNSQ), Outfit Z-Standard (ZSTD), dan uji unidimensionalitas. Reliabilitas dianalisis melalui Item Reliability, Person Reliability, dan Cronbach Alpha. Model Rasch digunakan karena mampu menunjukkan kualitas item, tingkat persetujuan responden, serta pemetaan indikator berdasarkan logit (Sumintono & Widhiarso, 2014; Linacre, 2026).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan objek penelitian Tim Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal. Pengumpulan data dilakukan dalam rangkaian kegiatan penelitian skripsi tahun akademik 2025/2026, terutama pada tahap penelitian dan pengumpulan data yang dirancang dalam jadwal penelitian sebelum penyusunan akhir skripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penegakan preventif dan represif Tim Satuan Tugas dalam pemberantasan rokok ilegal dengan menggunakan dua pendekatan teoritis. Penegakan preventif dilihat melalui aspek penyampaian pesan, relevansi, sumber informasi, dan keterlibatan masyarakat, sejalan dengan konsep preventive enforcement yang berorientasi pada pencegahan sebelum pelanggaran terjadi (Friehe & Tabbach, 2013). Penegakan represif dianalisis melalui aspek kepastian, kecepatan, konsistensi, dan kewajaran penindakan dalam pendekatan Swift-Certain-Fair (Bartels, 2017).

3.1. Kualitas Instrumen Penelitian

Sebelum hasil penelitian ditafsirkan, penulis melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kuesioner. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 15 item kuesioner dinyatakan valid. Nilai Outfit MNSQ berada pada rentang 0,61 sampai 1,42, sedangkan nilai Outfit ZSTD berada pada rentang -1,01 sampai 1,34. Kedua rentang tersebut memenuhi kriteria yang digunakan dalam Model Rasch.

Uji unidimensionalitas menunjukkan nilai raw variance explained by measures sebesar 50,2%, sehingga memenuhi syarat minimal 20%. Nilai raw unexplained variance tertinggi sebesar 10,3%, sehingga tidak melebihi batas 15%. Dengan demikian, instrumen dinilai mampu mengukur konstruk yang seharusnya diukur dalam penelitian ini.

Reliabilitas instrumen juga menunjukkan hasil yang memadai. Nilai Item Reliability sebesar 0,90 berada pada kategori bagus. Nilai Person Reliability sebesar 0,80 berada pada kategori cukup. Sementara itu, nilai Cronbach Alpha sebesar 0,81 berada pada kategori bagus sekali. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen kuesioner layak digunakan untuk membaca kecenderungan respons responden terhadap penegakan preventif dan represif.

Tabel 1.
Ringkasan Hasil Uji Instrumen

Aspek Uji	Hasil	Keterangan

Outfit MNSQ	0,61 sampai 1,42	Memenuhi kriteria validitas item
Outfit ZSTD	-1,01 sampai 1,34	Memenuhi kriteria validitas item
Raw variance explained by measures	50,2%	Memenuhi syarat unidimensionalitas
Raw unexplained variance tertinggi	10,3%	Tidak melebihi batas 15%
Item Reliability	0,90	Bagus
Person Reliability	0,80	Cukup
Cronbach Alpha	0,81	Bagus sekali

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan output Winsteps, 2026.

3.2. Indikator Pendukung Penegakan Preventif dan Represif

Hasil Variable Maps dan Item Measure menunjukkan bahwa terdapat tiga item yang paling mudah disetujui oleh responden. Ketiga item tersebut adalah konsistensi setiap pelanggaran ditindak (D1), relevansi pribadi (A1), dan keterlibatan partisipatif (A3). Item yang mudah disetujui dipahami sebagai indikator pendukung karena mayoritas responden menilai aspek tersebut telah berjalan relatif baik.

Tabel 2.
Item yang Paling Mudah Disetujui

Kode	Mudah Disetujui	Nilai Logit
D1	Konsistensi setiap pelanggaran ditindak	-0,92
A1	Relevansi pribadi	-0,79
A3	Keterlibatan partisipatif	-0,73

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil Item Measure, 2026.

3.2.1. Konsistensi Setiap Pelanggaran Ditindak

Item D1 merupakan item yang paling mudah disetujui dengan nilai logit -0,92. Pernyataan yang diukur adalah bahwa setiap pelanggaran yang ditemukan pasti ditindak. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menilai Tim Satuan Tugas telah memiliki konsistensi dalam menindak rokok ilegal yang ditemukan di lapangan.

Temuan ini menjadi indikator pendukung penegakan represif. Dalam pendekatan Swift-Certain-Fair, konsistensi penindakan mencerminkan unsur certain atau kepastian (Bartels, 2017). Masyarakat akan lebih mudah memahami akibat hukum apabila pelanggaran yang ditemukan ditindak secara konsisten dan tidak dibiarkan tanpa respon.

3.2.2. Relevansi Pribadi

Item A1 memiliki nilai logit -0,79 dan menjadi item kedua yang paling mudah disetujui. Pernyataan ini mengukur apakah sosialisasi dinilai penting dan berhubungan dengan usaha atau

lingkungan masyarakat. Tingginya persetujuan menunjukkan bahwa responden memandang materi sosialisasi tentang rokok ilegal dekat dengan kepentingan mereka.

Dalam Elaboration Likelihood Model, relevansi pribadi merupakan bagian dari motivated to process (Petty & Cacioppo, 1986). Masyarakat akan lebih terdorong memproses pesan apabila pesan tersebut dirasakan berhubungan langsung dengan kepentingan usaha, aktivitas perdagangan, atau risiko hukum yang mereka hadapi.

3.2.3. Keterlibatan Partisipatif

Item A3 memiliki nilai logit -0,73 dan menunjukkan bahwa responden menilai masyarakat diberi kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat saat sosialisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi juga memberi ruang interaksi antara satgas dan masyarakat.

Keterlibatan partisipatif merupakan indikator pendukung penegakan preventif karena masyarakat tidak hanya menjadi objek penyampaian informasi, tetapi juga subjek yang dapat bertanya, mengklarifikasi, dan menyampaikan pandangan. Kondisi ini memperkuat komunikasi persuasif dan memperbesar peluang terbentuknya kesadaran hukum terhadap bahaya serta konsekuensi penjualan rokok ilegal.

3.3. Indikator Penghambat Penegakan Preventif dan Represif

Selain indikator pendukung, hasil penelitian juga menunjukkan tiga item yang paling sulit disetujui oleh responden. Ketiga item tersebut adalah daya tarik sumber (B2), frekuensi penindakan (D2), dan kecepatan administrasi atau pelaporan (C2). Item yang sulit disetujui dipahami sebagai indikator penghambat karena masih belum sepenuhnya dirasakan optimal oleh responden.

Tabel 3.
Item yang Paling Sulit Disetujui

Kode	Sulit Disetujui	Nilai Logit
B2	Daya tarik sumber	+2,55
D2	Frekuensi penindakan	+2,36
C2	Kecepatan administrasi/laporan	+2,10

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil Item Measure, 2026.

3.3.1. Daya Tarik Sumber

Item B2 merupakan item yang paling sulit disetujui dengan nilai logit +2,55. Item ini mengukur apakah pemateri sosialisasi merupakan orang yang memiliki pengaruh atau dikenal oleh masyarakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden belum sepenuhnya menilai pemateri sebagai figur yang populer, berpengaruh, atau dikenal luas.

Temuan ini tidak berarti bahwa pemateri tidak memiliki keahlian. Pemateri dari unsur satgas seperti Bea Cukai, Satpol PP, Kepolisian, atau Kejaksaan justru memiliki kewenangan dan kompetensi teknis. Namun, dalam konteks komunikasi persuasif, daya tarik sumber juga penting

untuk menarik perhatian awal masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi dapat diperkuat dengan menghadirkan tokoh lokal, aparat wilayah, atau figur yang lebih dikenal masyarakat bersama pemateri teknis.

3.3.2. Frekuensi Penindakan

Item D2 memiliki nilai logit +2,36 dan menunjukkan bahwa responden belum sepenuhnya merasakan pemeriksaan atau razia dilakukan secara rutin dan terlihat. Walaupun operasi penindakan telah dilakukan, kehadirannya belum selalu dipersepsikan sebagai kegiatan yang berulang, merata, dan tampak di lingkungan masyarakat.

Hasil DIF menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara Tim Satuan Tugas dan pedagang. Tim satgas memandang operasi telah dilakukan sesuai agenda kerja, sedangkan pedagang menilai kegiatan pemeriksaan belum cukup sering terlihat di wilayah usaha mereka. Perbedaan ini menunjukkan adanya jarak antara pelaksanaan program dari perspektif pelaksana dan pengalaman masyarakat sebagai sasaran pengawasan.

3.3.3. Kecepatan Administrasi/Laporan

Item C2 memiliki nilai logit +2,10 dan menunjukkan bahwa responden belum sepenuhnya meyakini laporan atau rekap hasil penindakan terbit cepat setelah razia. Pada aspek ini, masalah bukan hanya menyangkut penyusunan laporan internal, tetapi juga keterlihatan hasil penindakan bagi masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara satgas dan pedagang. Tim satgas lebih cenderung menilai laporan telah disusun sesuai mekanisme, sedangkan pedagang lebih banyak berada pada posisi netral atau tidak menyetujui karena mereka tidak selalu mengetahui tindak lanjut administratif setelah razia. Dalam pendekatan Swift-Certain-Fair, hal ini menunjukkan bahwa unsur swift pada aspek administrasi dan pelaporan masih perlu diperkuat agar hasil penindakan lebih cepat diketahui dan dipahami publik.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini sejalan dengan Baidhowah (2019), Ahsan dkk. (2024), Suarda dkk. (2024), serta penelitian Budiman (2024), Gani dkk. (2024), dan Sutri dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa pemberantasan rokok ilegal dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Preventif diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi, sedangkan represif dilakukan melalui operasi pasar, razia, penyitaan, dan penindakan terhadap pelanggaran.

Temuan ini juga memiliki persamaan dengan Muzammil (2024), Ardiansah dan Suroso (2025), Suhendi (2021), serta Supriatna (2019) yang menegaskan pentingnya kerja sama antarinstansi, peran Satpol PP, sosialisasi, dan penegakan yang konsisten dalam mengatasi pelanggaran di bidang ketertiban umum maupun rokok ilegal. Namun, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya karena tidak hanya menyebut adanya kerja sama, tetapi mengukur persepsi responden terhadap indikator yang mendukung dan menghambat kerja satgas.

Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus kelembagaan dan metode. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji instansi tertentu atau menggunakan pendekatan kualitatif,

sedangkan penelitian ini mengkaji tim satgas lintas instansi dengan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui Model Rasch. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai indikator yang paling kuat mendukung dan paling lemah menghambat penegakan preventif dan represif.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik pertama adalah adanya perbedaan persepsi antara anggota satgas dan pedagang. Nilai Mean Measure menunjukkan bahwa anggota satgas memiliki nilai logit lebih tinggi dibandingkan pedagang, yaitu +3,11 berbanding +1,35. Artinya, anggota satgas lebih banyak menyetujui item-item kuesioner dibandingkan pedagang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pelaksana program cenderung melihat kegiatan telah berjalan lebih baik, sementara pedagang sebagai sasaran program belum selalu merasakan hal yang sama.

Temuan menarik kedua adalah bahwa sosialisasi dinilai relevan dan partisipatif, tetapi pemateri belum dinilai memiliki daya tarik sosial yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi teknis belum selalu cukup dalam komunikasi publik. Sosialisasi akan lebih kuat apabila narasumber teknis dipadukan dengan figur lokal yang dekat dengan masyarakat.

Temuan menarik ketiga adalah bahwa penindakan dinilai pasti ketika pelanggaran ditemukan, tetapi frekuensi razia dan kecepatan pelaporan belum cukup terlihat. Dengan demikian, tantangan utama bukan hanya melakukan operasi, tetapi memastikan operasi tersebut tampak, diketahui, dan hasilnya tersampaikan kepada masyarakat secara jelas.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penegakan preventif dan represif Tim Satuan Tugas dalam pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Manggarai Barat telah menunjukkan indikator pendukung pada aspek relevansi pribadi dan keterlibatan partisipatif dalam sosialisasi, serta konsistensi penindakan terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi indikator penghambat pada aspek daya tarik sumber sosialisasi, frekuensi atau visibilitas razia, dan kecepatan administrasi atau pelaporan hasil penindakan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Tim Satuan Tugas perlu meningkatkan kualitas komunikasi sosialisasi dengan melibatkan pemateri yang kompeten sekaligus dikenal masyarakat, menyusun jadwal razia yang lebih teratur dan merata pada titik rawan, serta memperkuat transparansi hasil penindakan melalui informasi singkat yang mudah diakses masyarakat. Dengan cara tersebut, penegakan preventif dan represif tidak hanya berjalan secara internal, tetapi juga lebih dirasakan oleh masyarakat dan pedagang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan pendekatan kuantitatif deskriptif yang berfokus pada kuesioner, sehingga belum menggali secara mendalam pengalaman personal pedagang, aparat, dan tokoh masyarakat melalui wawancara. Selain itu, penelitian hanya dilakukan pada konteks Kabupaten Manggarai Barat, sehingga hasilnya tidak

serta-merta dapat digeneralisasi ke daerah lain yang memiliki karakteristik geografis dan kelembagaan berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode campuran atau kualitatif mendalam untuk menggali alasan di balik perbedaan persepsi antara satgas dan pedagang, khususnya terkait visibilitas razia, daya tarik pemateri, dan pelaporan hasil penindakan. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan efektivitas satgas pemberantasan rokok ilegal di beberapa daerah kepulauan atau daerah wisata lainnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat, KPPBC Labuan Bajo, Polres Manggarai Barat, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, unsur TNI dan Lanal Labuan Bajo, serta seluruh responden yang telah membantu pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi dan artikel ringkasan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ahsan, A., Rahmayanti, K. P., Amalia, N., Veruswati, M., Prabandari, Y. S., Martini, S., Yuniar, A. M., Utami, M. G., & Diniary, A. (2024). Evaluation of Tobacco Tax Funding to Eradicate Illicit Cigarettes in Indonesia: A Qualitative Approach. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 25(8), 2885-2893. https://doi.org/10.31557/APJCP.2024.25.8.2885

Ardiansah, W, Sugiharto, S Suroso, I. (2025). Law Enforcement on Illegal Cigarette Distribution by Customs Investigators in East Java I Region. Journal of Multidisciplinary Research. https://doi.org/10.56943/jmr.v4i3.851

Baidhowah, A. R. (2019). Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal di Indonesia. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 11(1), 17-34. https://doi.org/10.33701/jt.v11i1.631

Bartels, L. (2017). Swift, Certain and Fair: Does Project HOPE Provide a Therapeutic Paradigm for Managing Offenders? Palgrave Macmillan.

Budiman, H. (2024). Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Kuningan. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 15(1), 75-84. https://doi.org/10.25134/logika.v15i01.9583

Dai, X., dkk. (2025). The epidemiology and burden of smoking in countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 1990-2021: Findings from the Global Burden of Disease Study 2021. The Lancet Public Health, 10(6), e442-e455. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00326-8

Daulay, R. M. (2025). Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Lhokseumawe dalam Peredaran Rokok Ilegal. https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15074

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. Nas Media Pustaka.

Friehe, T., & Tabbach, A. (2013). Preventive enforcement. International Review of Law and Economics, 35, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.irle.2012.10.005

Gani, S. N., Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2024). Pengawasan terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 1(2), 1322-1329. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/160

Ilham, M., & Rahman, A. (2023). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. PT Pustaka Interes Media Amani. https://pustakainteres.com

Kemenkeu Learning Center. (2022). Apa Itu Rokok Ilegal? Kementerian Keuangan. https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/apa-itu-rokok-ilegal-76df3ca4/detail/

Linacre, J. M. (2026). A User's Guide to WINSTEPS: Rasch-Model Computer Program. Winsteps.com.

Muzammil, M. A. (2024). Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68236

Paraje, G., Flores Munoz, M., Wu, D. C., & Jha, P. (2024). Reductions in smoking due to ratification of the Framework Convention for Tobacco Control in 171 countries. Nature Medicine, 30(3), 683-689. https://doi.org/10.1038/s41591-024-02806-0

Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The Elaboration Likelihood Model of Persuasion. Advances in Experimental Social Psychology, 19, 123-205.https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60214-2

Suarda, I. G. W., Hamman, E., Anggono, B. D., Setyawan, F., Taufiqurrohman, M. M., & Priambudi, Z. (2024). Illicit cigarette trade in Indonesia: Trends and analysis from the recent judgments. *Sriwijaya Law Review*, *8*(1), 38–59. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2726.pp38-59

Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Menjaga Wibawa Pemerintah dengan Menegakkan Peraturan Daerah. Jurnal Tatapamong, 3(2), 157-175. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588

Supriatna, D. (2019). Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Tertib Rokok: Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Jurnal Tatapamong, 1(1), 9-20. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1142

Sumintono, B., & Widhiarso, W. (2014). Aplikasi Model Rasch untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Trim Komunikata.

Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 127/KEP/HK/2025 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Manggarai Barat.

Sutri, P., Purba, G., & Jamba, P. (2022). Peran Bea Cukai dalam Pengawasan Rokok Ilegal yang Masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Kota Batam. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(5), 2153-2160. https://doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2153-2160